

# LAPORAN KEGIATAN

## PERTEMUAN RUTIN I UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT



DISUSUN OLEH  
PROJECT OFFICER TORAJA UTARA  
KONSORSIUM KAPABEL

19 FEBRUARI 2021  
TORAJA UTARA

## A. ALAS PIKIR

Pada Kabupaten Toraja Utara, terdapat 3 Desa/Kelurahan yakni Lembang Sapan Kua – kua, Lembang Karre Limbong serta Kelurahan Bokin yang menjadi sasaran dalam program ini. Focus program pada kabupaten toraja utara ini adalah **Penguatan Perhutanan Sosial Dalam Mendorong Pangan Hutan di Wilayah Hulu DAS Saddang**. Diharapkan kedepannya, melalui pengelolaan kawasan hutan, terdapat keberagaman pangan sehingga pangan tidak lagi dihasilkan oleh pertanian tapi juga melalui kawasan hutan agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya tujuan tersebut didasari oleh kondisi – kondisi permasalahan yang ada di daerah intervensi, seperti maraknya pengelolaan kawasan hutan yang kurang baik, kebencanaan yang banyak terjadi di daerah intervensi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait pangan dan perubahan iklim.

Dilain sisi, lahan yang dikelola oleh masyarakat berada didalam kawasan hutan, sehingga secara administratif tidak terdaftar sebagai pengelola maupun memiliki izin dalam kawasan hutan. hal itulah yang menjadi penyebab masyarakat dianggap ilegal dalam mengelola lahan didalam kawasan hutan, terlebih lahan tersebut telah dikelola jauh sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan dan dikelola secara turun temurun. Maka dari itu, melalui skema perhutanan sosial sebagai salah satu bentuk yang solutif untuk menengahi kedua belah pihak pada persoalan pengelolaan kawasan hutan.

Namun dalam pengusulan skema perhutanan sosial tersebut, masyarakat harus mengetahui secara mendalam dari awal hingga proses pengelolaan dalam kawasan. Sehingga diperlukan suatu kegiatan pertemuan untuk menyusun secara partisipatif proposal pengusulan perhutanan sosial, agar masyarakat dapat dijadikan sebagai subjek dalam pengelolaan. Dilain sisi, pertemuan ini juga untuk mendukung kapasitas masyarakat untuk sebagai dasar mereka dalam pengelolaan perhutanan sosial.

## B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan pertemuan rutin ini adalah:

1. Penyusunan proposal usulan perhutanan sosial secara partisipatif
2. Diskusi Perhutanan sosial khususnya skema Hutan Kemasyarakatan

Output yang diharapkan dari pertemuan ini adalah:

1. Adanya dokumen proposal usulan perhutanan sosial
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat terkait pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM)

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 1. Deskripsi Alur Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pertemuan Rutin dilakukan di 2 Desa/Kelurahan intervensi di Kabupaten Toraja Utara, kegiatan ini dilakukan di waktu yang berbeda – beda sesuai dengan kondisi Desa/Kelurahan masing – masing. Terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di masing – masing Desa/Kelurahan antara lain:

#### 1.1. Lembang Sapan Kua – kua

Kegiatan Pertemuan Rutin dilakukan di Kantor Kelurahan Bokin, pada hari Minggu, 14 Februari 2021, pukul 14.00 – 16.00 WITA. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 11 orang, dengan pembagian jumlah laki – laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Yang bergabung didalamnya yakni Gabungan Kelompok Tani Hutan dan PMU.

Kegiatan ini dimulai dengan pemberian Materi tentang seputar Hutan Kemasyarakatan, lalu dilanjutkan dengan diskusi terkait materi tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengisian kuisioner untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Hutan Kemasyarakatan. Setelah pengisian kuisioner ini, dilanjutkan dengan membahas hasil – hasil isian kuisioner tersebut.

#### 1.2. Kelurahan Bokin

Kegiatan Pertemuan Rutin dilakukan di Kantor Kelurahan Bokin, pada hari Senin, 15 Februari 2021, pukul 10.00 – 12.00 WITA. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 21 orang, dengan pembagian jumlah laki – laki sebanyak 18 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Yang bergabung didalamnya yakni Gabungan Kelompok Tani Hutan dan PMU.

Kegiatan ini dimulai dengan pemberian Materi tentang seputar Hutan Kemasyarakatan, lalu dilanjutkan dengan diskusi terkait materi tersebut. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengisian kuisioner untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat tentang Hutan Kemasyarakatan. Setelah pengisian kuisioner ini, dilanjutkan dengan membahas hasil – hasil isian kuisioner tersebut.

### 2. Output Kegiatan Pertemuan

Output dari kegiatan pertemuan ini antara lain:

#### 2.1. Lembang Sapan Kua - Kua

Dari kegiatan ini, telah tersusun sebagian dokumen usulan perhutanan sosial, masih terdapat beberapa kekurangan seperti KTP dan peta usulan lokasi perhutanan sosial. Peta usulan masih belum fix antara KPH dan masyarakat, hal ini dikarenakan lokasi usulan masyarakat berada di blok inti tata kelola KPH. Sehingga, masih diperlukan advokasi lebih lanjut terkait lokasi usulan yang terdapat di Lembang Sapan Kua-kua.

Selain daripada penyusunan dokumen usulan perhutanan sosial, juga dilakukan penilaian sejauh mana pengetahuan masyarakat terkait perhutanan sosial khususnya Hutan Kemasyarakatan.

Dari hasil penilaian tersebut, dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui alasan yang tepat dalam pemilihan skema perhutanan sosial dan cara mendapatkan akses perhutanan sosial. Selain itu, status kawasan dan pelaku utama dalam pengelolaan HKm juga masih belum banyak yang mengetahui. Sehingga untuk kedepannya akan lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas terkait hal – hal yang kurang dari hasil penilaian tersebut.

Tabel 1. Hasil penilaian

No.	Nama	Kelompok	Jabatan	Penilaian Jawaban berdasarkan nomor soal										Nilai	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Jhon Sasira Pongsapan	KTH Tombangriri	Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90
2	M. Dominggus Rahing	KTH Sipaele	Ketua	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	50
3	Sule	KTH Sipaele	Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70
4	Markus Sallekarurung	KTH Tombangriri	Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80
5	Markus Lambung	KTH Tambuntana	Ketua	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	40
6	Petrus Batururu	KTH Sipaele	Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60
7	Destin B	KTH Sipaele	Sekretaris	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	80
8	Rifce Sambolayuk	KTH Tombangriri	Bendahara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70
9	Marthen Duma	Gapoktanhut Sapan Kua-Kua	Ketua	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	60
10	Daniel Barung	KTH Sipaele	Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90

## 2.2. Kelurahan Bokin

Dari kegiatan ini, telah tersusun sebagian dokumen usulan perhutanan sosial, masih terdapat beberapa kekurangan seperti KTP. Sedangkan untuk yang lainnya, telah terpenuhi baik dari sisi pemetaan dan lain – lain.

Selain daripada penyusunan dokumen usulan perhutanan sosial, juga dilakukan penilaian sejauh mana pengetahuan masyarakat terkait perhutanan sosial khususnya Hutan Kemasyarakatan.

Dari hasil penilaian tersebut, dapat dilihat bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui alasan yang tepat dalam pemilihan skema perhutanan sosial dan syarat – syarat dalam pengusulan perhutanan sosial serta berkas yang harus ada dalam proposal usulan.

Tabel 2. Hasil penilaian

No.	Nama	Kelompok/ Instansi	Jabatan	Penilaian Jawaban berdasarkan nomor soal										Nilai	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Elisabet Parinding	Pemerintah Kelurahan	Staff	√	√	√	√		√	√	√	√	√		80
2	Lewi Pasomba	KTH Katengkong	Anggota	√	√	√		√		√	√	√	√	√	80
3	Fitrianti S. Tiranda	Gapoktanhut Pedamaran	Bendahara	√	√	√	√	√	√		√	√			80
4	Yohanis Lesi Turu	Gapoktanhut Pedamaran	Sekretaris	√	√		√		√	√	√	√			70
5	Joni Matutu	KTH Katengkong	Anggota	√	√		√	√				√			50
6	Matius Pabuntang	KTH Mata Wai	Sekretaris	√	√			√					√		40
7	Yuli Bannemanik	KTH Mata Wai	Ketua	√	√	√		√			√	√			60
8	Simon Sipi Sekawan	KTH Katengkong	Sekretaris	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	90
9	Tadius B	KTH Katengkong	Bendahara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100
10	Mutmainnah	Pemerintah Kelurahan	Staff	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100
11	Anton Victor Ratu	KTH Sari Hutan	Anggota	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100
12	Petrus Matutu	KTH Katengkong	Ketua	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100
13	Edi Paingi'	KTH Sari Hutan	Ketua	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	90
14	Meti Patallang	KTH Sari Hutan	Bendahara	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100

#### D. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Tidak adanya anggota disabilitas yang terlibat didalam kegiatan sosialisasi sehingga penyebaran informasi ini tidak menyentuh secara keseluruhan sasaran yang terlibat dalam program.
2. Data dan informasi Kelompok HKm yang diambil pada Lembang Karre Limbong, hanya sebagian saja. Penyebabnya adalah ketidakhadiran peserta dalam kegiatan karena bertabrakan dengan kegiatan – kegiatan acara adat dan persiapan natal.
3. Pada Lembang Sapan Kua – kua khususnya dusun limbong, belum terbentuk KTH karena masyarakat tidak mau mengambil keputusan pada saat pertemuan hal itu dikarenakan kurangnya peserta yang hadir dalam kegiatan.
4. Pada Kelurahan Bokin khususnya dusun bamba, belum semua terbentuk kelompok tani hutan (KTH) karena masyarakat tidak mau mengisi struktur dalam KTH dan masih menunggu orang – orang untuk dimusyawarahkan.

## E. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Pertemuan pembentukan Kelompok Tani Hutan pada Dusun Limbong, Lembang Sapan Kua – Kua
2. Pertemuan pembentukan Kelompok Tani Hutan pada Dusun Bamba, Kelurahan Bokin
3. Pertemuan pembentukan Gabungan Kelompok Tani Hutan di Kelurahan Bokin dan Lembang Sapan Kua - Kua
4. Verifikasi data – data keanggotaan kelompok tani hutan yang diusulkan oleh masyarakat.
5. Melengkapi administrasi Kelompok Tani Hutan dan Gabungan Kelompok Tani Hutan.
6. Pada Lembang Karre Limbong, akan dilakukan pertemuan pada tingkat Kelompok Tani Hutan dengan tujuan untuk mensosialisasikan program dan meminta masukan – masukan sekaligus memperdalam data dan informasi yang diinginkan.

## F. DOKUMENTASI